

► REALISASI ANGGARAN

DPRD Khawatir Opini BPK

SOLO—Banyaknya penerima dana hibah dan bantuan sosial (bansos) 2013 yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj) akan berpengaruh kepada opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

DPRD khawatir predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama ini akan turun menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, saat ditemui wartawan, Senin (3/3), mengatakan banyaknya penerima hibah dan bansos yang tidak menyerahkan LPj pernah terjadi di 2012 lalu. Dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perubahan 2012, terang Supriyanto, pernah muncul angka Rp29 miliar dana hibah dan bansos yang belum ada LPj-nya.

“Ketika persoalan LPj muncul lagi di 2013, kami khawatir akan mempengaruhi opini BPK. Harapan kami Pemkot Solo tetap mendapat predikat WTP lagi. Tapi, kami khawatir dengan adanya penerima hibah dan bansos yang belum menyerahkan LPj, predikat WTP akan turun menjadi WDP,” ujar Supriyanto.

Supriyanto yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) itu menjelaskan Banggar pernah memberi rekomendasi kepada Pemkot agar memberi sanksi *blacklist* kepada penerima hibah dan bansos yang tidak menyampaikan LPj. Bahkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2013, persoalan itu ditanyakan lagi. “Kalau tidak salah Oktober lalu, ternyata masih ada dana bansos dan hibah yang belum ada LPj-nya. Ya, itu nanti menjadi catatan kami di Banggar dan menjadi materi pembahasan kami terkait laporan keterangan pertanggungjawaban [LKPj] Wali Kota,” tegas dia.

Menurut Supriyanto, Pemkot harus mengambil kebijakan agar setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melakukan asistensi kepada penerima hibah dan bansos, terutama saat menyusun LPj. Langkah itu, terang dia, menjadi solusi alternatif bagi Pemkot untuk meminimalisasi potensi temuan BPK. “Tahun ini alokasi anggaran hibah dan bansos masih besar, yakni Rp76 miliar. Di APBD Perubahan 2013 saja, mencapai Rp124 miliar,” pungkas dia. *(Tri Rahayu)*